

IMPLEMENTASI AUDIT SEKTOR PUBLIK DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA INSPEKTORAT KOTA BIMA

Septyanty Galang Ambarwati
ambar1487@yahoo.com
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRACT

Increasing levels of fraud in Bima is significantly each year, then the role of public sector audit in fraud should be increased in tackling fraud prevention, So this study aims to determine the effect of the implementation of public sector audit in preventing fraud in the City Inspectorate Bima. The method used in this research is Simple linear regression analysis, by spreading questionnaire on all employees of the secretariat on the Bima city inspectorate as many as 20 samples. The results of this study indicate that the public sector audit influence the prevention of fraud.

Keyword : Public Sector Audit, Fraud, Prevention of Fraud.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan roda pemerintahannya pemerintah daerah Kota Bima telah menyelenggarakan pimpinan pemerintahan melalui fungsi organik manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tugas pengawasan menanggung beban yang cukup berat, maka sebagai konsekuensinya tentu saja dalam implementasinya dibutuhkan sinergitas semua aspek pelaksanaan tugas pengawasan. Hal itu menyangkut sisi landasan hukum, kesisteman yang menyangkut kejelasan tentang kewenangan dan tanggung jawab institusi organisasi dan tata laksanaannya maupun aspek lainnya seperti status kepegawaian. Dalam hal ini secara keseluruhan semua prasyarat ini harus didukung oleh aparat pengawasan yang memiliki tingkat

profesionalisme dan dedikasi berikut moral yang tinggi disamping selalu menjunjung tinggi kode etik yang menjadi acuannya (Inspektorat, 2012).

Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan, hal ini tertuang dalam ketetapan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-SAFP) Tahun 1996 oleh BPKP dengan keputusan Kepala BPKP No. Kep-378/K/1996. SA-APFP secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia.

Audit sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik. Sebagai salah satu bidang, audit sektor publik lebih merupakan pilar, apabila pilar itu runtuh, maka keberadaan akuntansi sektor publik pun akan dipertanyakan. Oleh sebab itu, keseriusan pengembangan akuntansi sektor publik baik ditingkat system maupun standar seharusnya diikuti dengan pengembangan audit, selain itu, berbagai stagnasi politik yang terjadi dalam reformasi pimpinan keuangan sektor publik akan dapat dipecahkan melalui implementasi opini audit, baik untuk pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik. Tujuan pelaksanaan audit sektor

publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Ulum, 2009).

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Menurut Transparansi Internasional (TI), sebagian besar fraud dalam masyarakat melibatkan dua aktor utama, yakni pemerintah dan sektor swasta, kenyataannya sekarang fraud di instansi pemerintahan intensitasnya meningkat. Pada umumnya fraud akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada pemerintahan Kota Bima tercatat kasus fraud yang terjadi selama periode 2007 sampai dengan 2011, yaitu 2007 tercatat 17 kasus, 2008 tercatat 18 kasus, 2009 tercatat 19 kasus, 2010 28 kasus, dan 2011 tercatat 20 kasus, Dari indeks tersebut bisa kita lihat telah terjadi peningkatan kecurangan yang signifikan pada

Tahun 2010, peningkatan tersebut terjadi bersumber pada pengaduan masyarakat dan media masa/surat kabar (Inspektorat, 2012)

Kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*) selain melalui struktur/mechanisme pengendalian intern. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas pengendalian intern adalah pihak pimpinan suatu organisasi. Dalam rangka pencegahan *fraud*, maka berbagai upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku *fraud* tidak berani melakukan *fraud*. Apabila *fraud* terjadi, maka dampak (*effect*) yang timbul diharapkan dapat diminimalisir. Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan *fraud* dengan jalan melakukan pengujian (*test*) atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial (*potential risk*) telah diidentifikasi.

Inspektorat sebagai internal auditor, sesuai ketentuan peraturan daerah Kota Bima Nomor 22 Tahun 2007, tugas pokoknya adalah mencakup pemeriksaan, pengujian, pengutusan, penilaian dalam Pemerintahan Kota Bima itu sendiri dalam rangka melindungi, melayani, membudayakan, dan mensejahterkan masyarakat. Auditor internal berfungsi membantu pimpinan dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Pemerintah masih perlu membenahi kinerja audit yang masih lemah untuk menjalankan visi, misi, dan program-program yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab auditor internal dalam bentuk lembaga pengawasan pemerintah. Oleh

karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh implementasi atas audit sektor publik dalam pecegahan fraud pada inspektorat Kota Bima dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi atas audit sektor publik dalam pecegahan fraud pada Inspektorat Kota Bima.

KAJIAN PUSTAKA

Prosedur dalam klasifikasi implementasi audit sektor publik

Adapun prosedur dalam penentuan klasifikasi implementasi audit sektor publik pada Inspektorat Kota Bima merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Inspektorat Kota Bima, ketetapan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-SAFP) Tahun 1996 oleh BPKP dengan keputusan Kepala BPKP No. Kep-378/K/1996. SA-APFP secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia, dan yang terakhir adanya kebutuhan pelayanan publik (inspektorat, 2012)

Implementasi Audit Sektor Publik

implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Prosesnya adalah seperti memantau kegiatan harian dalam kebijakan, penilaian kegiatan dan kepuasan klien dengan layanan yang diberikan. Sedangkan audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah (Riduwan, 2007).

Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara. Audit sektor publik dikembangkan dalam satu konteks akuntansi sektor publik, yang mempunyai elemen-elemen sistem akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan sektor publik, akuntansi biaya sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, teori akuntansi sektor publik, dan penilaian prestasi sektor publik. Audit sektor publik juga dipengaruhi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, seperti undang-undang. Selain itu, kinerjanya juga ditentukan oleh peraturan-peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, dan aturan lainnya. Bahkan proses audit sektor publik tak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, sebagai sumber peraturan di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan audit sektor publik tak dapat dipisahkan dari proses politik ekonomi dan perundang-undangan. Audit sektor publik tidak hanya dilekatkan pada profesi akuntan, tetapi juga organisasi. Lembaga auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat, merupakan tempat perkumpulan para auditor. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan tertinggi untuk pemeriksaan keuangan organisasi sektor publik di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai auditor eksternal. Lembaga ini berada di level nasional. Selain BPKP, di internal pemerintahan, Inspektorat Jendral merupakan auditor internal di peringkat departemen. Sedangkan Inspektorat Wilayah Provinsi merupakan auditor internal skope provinsi, Inspektorat Wilayah Kotamadya dan Kabupaten di peringkat kotamadya/kabupaten (Inspektorat, 2012)

Tugas Inspektorat

Inspektorat merupakan aparat pengawas fungsional. Badan ini secara taktis operasional berada dan bertanggung jawab terhadap kepala daerah. Sedangkan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). Berdasarkan pasal 2 Kep. Mendagri No. 110/1991. Inspektorat mempunyai tugas, yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah desa, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan daerah, pembinaan masyarakat di lingkungan pemerintah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/ kelurahan (Inspektorat, 2012).

Pencegahan Fraud

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencegahan kecurangan (fraud) adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan (Bastian, 2010)

Langkah-langkah Pencegahan fraud

kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara sebagai berikut yaitu, membangun struktur pengendalian intern yang baik maksudnya adalah SPIP akan berjalan dengan baik apabila SDM aparatur pemeriksa diberikan kesempatan untuk meningkatkan Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*) selain melalui struktur / mekanisme pengendalian intern. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas

pengendalian intern adalah Inspektur Kota Bima dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima mengingat salah satu fungsi lembaga ini adalah pengawasan penyelenggaraan dan pemanfaatan keuangan daerah yang kedua mengefektifkan aktivitas pengendalian maksudnya adalah aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan tindakan penyelidikan, perbaikan dan review atas kinerja fungsional. Yang ketiga meningkatkan kultur organisasi maksudnya adalah Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien yang keempat adalah mengefektifkan fungsi internal audit, rotasi bagi aparatur pemeriksa apabila telah memenuhi atau apabila telah melebihi atau memenuhi batas waktu menjabat sebagai auditor untuk menghindari kejenuhan dan mempersempit upaya melakukan kecurangan secara bersama sama. Yang kelima membuka kontak pengaduan secara online maksudnya adalah memberikan ruang publik untuk mengadukan setiap adanya indikasi, sedang terjadi ataupun hasil daripada penyelenggaraan kegiatan program publik dengan etika pelapor dijamin kerahasiaan dan keamanannya. Dan yang terakhir proactive fraud auditing, Seringkali investigasi terhadap fraud dilakukan setelah ada korban, yang artinya bersifat reaktif. Audit yang bersifat pro-aktif diharapkan akan membangun kesadaran para personel bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat bisa saja “di-review”. Hal ini akan memberikan para personel rasa takut akan tertangkap jika melakukan fraud, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku kecurangan dan efek jera (Amrizal, 2004).

Pengaruh Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan Fraud

Pengaruh implementasi audit sektor publik dalam pencegahan fraud pada inspektorat Kota Bima adalah bisa menimbulkan semangat kompetitor bagi setiap karyawan dan karyawatnya, memberikan gairah untuk selalu mempertajam pemahaman, aplikasi dan regulasi yang berhubungan dengan fraud yang kedua memberikan rasa bangga dengan andil ikut mencegah, mengawasi dan memeriksa adanya indikasi ataupun pelanggaran dalam hal fraud sektor publik (Inspektorat, 2012).

Pendeteksian fraud

Deteksi *fraud* mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan (*fraud indicators*) yang memerlukan tindaklanjut auditor internal untuk melakukan investigasi. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh auditor internal agar pendeteksian *fraud* lebih lancar antara lain memiliki keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya fraud. Dalam hal ini auditor internal harus mengetahui secara mendalam mengapa seseorang melakukan *fraud* termasuk penyebab *fraud*, jenis-jenis *fraud*, karakteristik *fraud*, modus operandi (teknik-teknik) *fraud* yang biasa terjadi. Yang kedua adalah memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian (*test*) untuk menemukan indikator terjadinya fraud. apabila diperlukan dapat menggunakan alat bantu (*tool*) berupa ilmu akuntansi forensik (*forensic accounting*) untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) yang kuat dan valid. *Forensic accounting* merupakan suatu integrasi dari akuntansi (*accounting*), teknologi informasi (*information technology*) dan keahlian investigasi (*investigation skill*). Dan yang terakhir memiliki keakuratan & kecermatan (*accuracy*) dalam mengevaluasi indikator-indikator fraud tersebut (Amrizal, 2004).

Hubungan Audit Sektor Publik dengan Pencegahan Fraud

Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidak beresan.

Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi audit sektor publik berperan dalam Pencegahan *Fraud* adalah sebagai berikut :

Nama penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penulis: Muh.Arief Effendi Judul : Tanggung jawab auditor internal dalam pencegahan, Pendeteksian dan penginvestigasian kecurangan (2005)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Auditor internal bertanggung jawab membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di suatu organisasi, Agar dapat menjalankan tugas yang diemban tersebut auditor internal perlu meningkatkan pengetahuan	Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama menitikberatkan pada keahlian profesional atau kemampuan profesional auditor internal dalam salah satu tugasnya untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi.	Penulis menitikberatkan pada keahlian profesional atau kemampuan profesional auditor internal dalam pemerintahan Sedangkan Muh. Arief Effendi lebih menitikberatkan pada keahlian profesional atau kemampuan profesional auditor internal

Sumber : Hasil Olahan

Nama penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penulis: Amrizal Judul: Pencegahan dan pendektisian kecurangan oleh auditor (2005).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecuranagan. Jika struktur internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang.	Persamaan dengan penulis buat adalah adanya pengaruh peranan antara auditor dalam pencegahan kecurangan dalam suatu kegiatan.	Penulis lebih menitikberatkan pada pemahaman audit menganalisa melalui kasus kecurangan yang terjadi. sedangkan dengan Amrizal lebih memahami secara tepat struktur pengendalian intern yang baik, agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Sumber : Hasil Olahan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya peranan variabel X terhadap variabel Y. Menurut Jonathan Sarwono (2006), regresi linier sederhana mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan satu variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari penggunaan analisis regresi, adalah untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel Y (Implementasi audit sektor publik) dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel X (pencegahan fraud). Dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

a = konstanta (nilai Y pada saat nol)

b = koefisien regresi

n = ukuran sampel atau banyak data di dalam sampel

X = nilai variabel independent

Y = nilai variabel depende

OBJEK PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengawasan Daerah yang sekarang menjadi Inspektorat di Pemerintahan Kota Bima. Penelitian ini dilakukan di Kota Bima karena Pemerintah Kota Bima merupakan daerah otonom baru sehingga unsur terjadinya kecurangn (*fraud*) di sektor publik rentan terjadi.

Populasi

Menurut Sugiyono (2009), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Inspektorat Kota Bima.

Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada obyek tertentu, Karena obyek dalam populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pengertian sampel menurut Sugiyono (2009), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu seluruh pegawai bagian sekretariat pada

Inspektorat Kota Bima. Alasan pemilihan bagian sekretariat karena dalam struktur organisasi Inspektorat Kota Bima belum mengacu pada auditor sebagai pejabat fungsional akan tetapi melekat pada pejabat struktural yang ada mulai dari kepala seksi pada irban/inspektor pembantu yang terdiri dari 4 bidang kesekretariatan di bawah pejabat struktural setingkat eselon 3A yaitu sekretaris inspektorat dan Inspektor Kota Bima sebagai pejabat struktural eselon 2B. Sekretariat Inspektorat Kota Bima merupakan bagian yang mengolah, merencanakan waktu dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemeriksa kepada outbreak (objek pemeriksaan). Kesekretariatan Inspektorat Kota Bima menindaklanjuti hasil pemeriksaan, melihat hasil bukti pengembalian berupa surat tanda setoran yang dibuktikan dari adanya registrasi dari bank ataupun PT.Pos dan Giro untuk hasil pemeriksaan yang sifatnya kesalahan di bidang administrasi adalah dengan melihat bentuk konkrit dari pejabat kepada bawahannya sebagai salah satu bentuk pengawasan melekat dan melaporkan hasil tindak lanjut pemeriksaan kepada BPK dan BPKP serta pimpinan daerah.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan oleh penulis melalui kuesioner, observasi dan wawancara ke Kantor Inspektorat Kota Bima. Data primer dalam penelitian ini yang pertama *Observasi* adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap bagian audit internal pada Inspektorat Pemerintah Kota Bima. yang kedua wawancara atau *Interview* adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang penulis teliti, dalam penulisan laporan ini, penulis melakukan wawancara dengan auditor internal pada Inspektorat Pemerintah Kota Bima yaitu

Bapak Adiansah, S.T. selaku Kepala Seksi (KASI) Pengawasan Bidang pembangunan dalam auditor internal yang kedua Bapak Joerainin, S.S. selaku KASI Pengawasan Bidang Pemerintahan dalam auditor internal pada Inspektorat Kota Bima. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Dalam pengumpulan data, kuesioner yang dibagikan berupa daftar pertanyaan yang diisi dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu alternatif pilihan.

Variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi audit sektor publik sebagai variabel (X) atau variabel independen, dan pencegahan fraud sebagai variabel (Y) atau variabel dependent

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. kuesioner
X Audit sektor publik	"Pengujian sistematis. Teorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja" (Ihyahul Ulum M.D:55)	1. Penelitian Awal	a. Maksud dan Ruang Lingkup	Ordinal	1,2
		Informasi kinerja sektor publik			3
		2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik	a. Kesesuaian dengan standar profesi b. Pengetahuan dan kecakapan c. Pendidikan berkelanjutan d. Ketelitian profesionalisme		4,5,6 7,8,9
		3. Fokus pada ukuran-ukuran pent	a. Perlindungan terhadap harta b. Perlindungan sumber daya secara ekonomis dan efisien		10,11 12
		4. Perencanaan & Pelaksanaan audit kinerja sektor publik	a. Perencanaan pemeriksaan b. Pengujian dan pengevaluasian informasi c. Penyampaian hasil pemeriksaan d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan		13 14,15 16 17
5. Pengendalian Kinerja	a. Kebijakan dan Prosedur b. Pengembangan SDM Audit Internal	18 19			

Sumber : hasil olahan

Variabel	Konsep variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Y Pencegahaan fraud.	“Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku” (Zabihollah Rezaee, Richard Riley 2005:7)	1. Menciptakan dan mengembangkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi	a. “Setting the at the top” (contoh:perilaku dari atasan) b. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat c. Pelatihan d. Disiplin	Ordinal	21
					22
					23
					24
		2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti fraud	a. Mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan b. Pengurangan resiko kecurangan c. Implementasi dan monitoring pengendalian intern		25
					26
					27
		3.Pengembangan proses pengawasan (<i>Overright process</i>)	a. Komite audit b. Manajemen c. Internal auditor		28
					29
					30

Sumber : Hasil Olahan

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memenuhi taraf kesesuaian dan kecepatan alat ukur (instrumen) dalam menilai suatu objek penelitian, instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur dan diinginkan dengan tepat, tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Tabel 3.2
Standar penilaian validitas

Standar Penilaian Untuk Validitas Validity	
Good	0,50
Acceptable	0,30
Marginal	0,20
Poor	0,10

Sumber : Cooper 2006

Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai “suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah” (Cooper, 2006).

Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran.

Tabel 3.3

Standar penilaian reliabilitas

Standar Penilaian Untuk Reliabilitas Reliability	
Good	0,80
Acceptable	0,70
Marginal	0,60
Poor	0,50

Sumber : Cooper 2006

Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian menggunakan teknik *spearman brown*. Metode ini menghitung reliabilitas dengan cara memberikan tes pada sejumlah subyek kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Rumus *Spearman Brown*:

$$r_i = \frac{2rb}{1+rb}$$

Keterangan:

r_i = reliabilitas internal seluruh instrumen

rb = korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Uji Hipotesis dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis data yang valid dan mendukung hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini. Uji hipotesis terdiri dari Uji T, Uji F, Koefisien Determinasi, dan selanjutnya Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 16.0, dengan hasil yaitu, pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang mengandung variabel Implementasi Audit

Sektor Publik (variabel X) ada 30 pertanyaan dengan jumlah responden 20. diperoleh hasil bahwa semua pertanyaan adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini

Tabel 4.1

Hasil Pengujian
Validitas Variabel *Independent Implementasi Audit Sektor Publik*

No.Instrumen	<i>r</i> hitung	<i>r</i> kritis	Keterangan
1	0,926	0,30	Valid
2	0,552	0,30	Valid
3	0,303	0,30	Valid
4	0,557	0,30	Valid
5	0,926	0,30	Valid
6	0,536	0,30	Valid
7	0,438	0,30	Valid
8	0,552	0,30	Valid
9	0,897	0,30	Valid
10	0,926	0,30	Valid
11	0,926	0,30	Valid
12	0,432	0,30	Valid
13	0,926	0,30	Valid
14	0,552	0,30	Valid
15	0,926	0,30	Valid
16	0,563	0,30	Valid
17	0,926	0,30	Valid
18	0,690	0,30	Valid
19	0,846	0,30	Valid
20	0,926	0,30	Valid

Sumber : Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan Implementasi Audit Sektor Publik (Variabel X) valid untuk digunakan dalam proses pengolahan analisis data, karena semua hasil korelasi tiap item menghasilkan nilai yaitu r_s hitung $>$ r_s tabel, sehingga validitas terpenuhi.

Tabel 4.2

Hasil Pengujian
Validitas Variabel *Dependent Pencegahan Fraud*

No.Instrumen	<i>r</i> hitung	<i>r</i> kritis	Keterangan
1	0,554	0,30	Valid
2	0,659	0,30	Valid
3	0,460	0,30	Valid
4	0,520	0,30	Valid
5	0,679	0,30	Valid
6	0,424	0,30	Valid
7	0,661	0,30	Valid
8	0,764	0,30	Valid
9	0,665	0,30	Valid
10	0,554	0,30	Valid

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen pencegahan *fraud* (Variabel Y) valid untuk digunakan dalam proses pengolahan analisis data, karena semua hasil korelasi tiap item menghasilkan nilai yaitu r_s hitung $>$ r_s tabel, sehingga validitas terpenuhi.

Uji reliabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 16.0 For Windows*, maka dapat diketahui bahwa variabel dependent dan independent sudah reliabel karena besarnya tingkat reliabilitas sudah diatas 0,7. Oleh karena instrumen variabel dependent dan independen yaitu implementasi audit sektor publik dan pencegahan *fraud* sudah valid dan reliabel, maka semua instrumen dalam variabel dependent dan independent dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran dalam penelitian tentang Implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* Pada Isnpektorat Kota Bima

Uji Asumsi Klasik.

Uji Multikorelasi

Tabel 4.3

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.038	3.472		4.044	.000		
	ASP	.190	.068	.458	2.773	.010	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Fraud

Sumber : Hasil Olahan

Tabel 4.4

Coefficient Correlations^a

Model			ASP
1	Correlations	ASP	1.000
	Covariances	ASP	.005

a. Dependent Variable: Fraud
Sumber : Hasil Olahan

Uji Multikorelasi

Tabel 4.5

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	ASP
1	1	1.973	1.000	.01	.01
	2	.027	8.585	.99	.99

a. Dependent Variable: Fraud
Sumber : hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF $1.000 < 10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

tabel 4.6

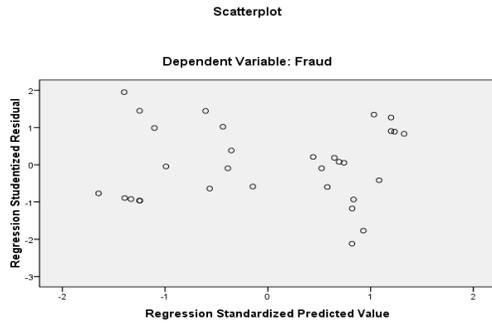
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.458 ^a	.210	.182	4.44313	1.502

a. Predictors: (Constant), ASP
b. Dependent Variable: Fraud
sumber : Hasil Olahan

Hasil uji gejala autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.502 artinya nilai Durbin-Watson berada diantara 1,201 dan 2,589 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas



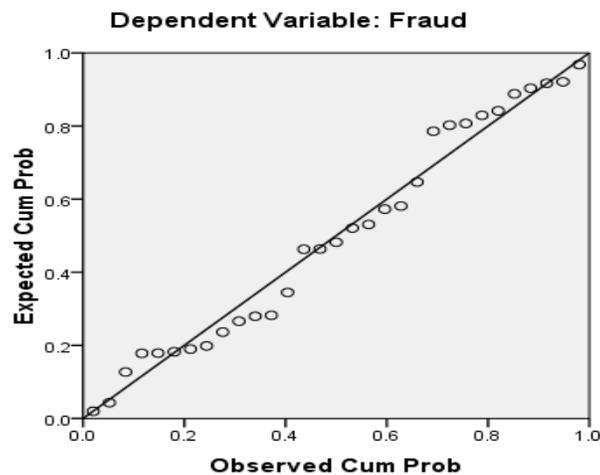
Gambar 4.1 Scetterplot Dependent Variable Fraud

Dari grafik scatterplots yang terdapat dalam grafik diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Gambar 4.2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Tabel 4.7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ASP	Fraud
N		31	31
Normal Parameters ^a	Mean	49.440	23.408
	Std. Deviation	1.1869	4.9136
Most Extreme Differences	Absolute	.187	.113
	Positive	.129	.113
	Negative	-.187	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		1.039	.631
Asymp. Sig. (2-tailed)		.230	.820
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : hasil Olahan

Dengan melihat tampilan grafik normal plot tampak bahwa pola titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih meyakinkan kesimpulan, perlu dilakukan uji statistic non parametric Kolmogrof-Smirnof.

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier sederhana

Tabel 4.8

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.458 ^a	.210	.182	4.44313

a. Predictors: (Constant), ASP

b. Dependent Variable: Fraud

sumber : Hasil Olahan

Nilai R sebesar 0,458 berarti peran atau kontribusi variabel implementasi audit sektor publik mampu menjelaskan variabel pencegahan *fraud* sebesar 45,8%. Nilai adjusted R Square sebesar 0.210 menunjukan besarnya peran atau kontribusi variabel audit sektor publik mampu menjelaskan variabel pencegahan *fraud* sebesar 21%.

Tabel 4.9

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151.827	1	151.827	7.691	.010 ^a
	Residual	572.500	29	19.741		
	Total	724.327	30			

a. Predictors: (Constant), ASP

b. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber : Hasil Olahan

Nilai probabilitas F (F-hitung) sebesar 0,010 menjelaskan bahwa variabel implementasi audit sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ($0,010 < 0,05$).

Tabel 4.10
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.038	3.472		4.044	.000		
	ASP	.190	.068	.458	2.773	.010	1.000	1.000

a. Dependent Variable: *Fraud*

sumber : Hasil Olahan

Nilai sig variabel implementasi audit sektor publik sebesar 0,010. Variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan data maka diperoleh hasil t_{hitung} 2,773. Berdasarkan perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} , maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} , yaitu $2,773 > 2,045$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa implementasi audit sektor publik berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi audit sektor publik akan membantu Inspektorat Kota Bima dalam pencegahan *fraud*, apabila implementasi audit sektor publik kurang memadai maka pencegahan *fraud* di Inspektorat Kota Bima kurang berkualitas, sebaliknya implementasi audit sektor publik baik dalam menjalani setiap program yang telah ditentukan maka pencegahan *fraud* di Inspektorat Kota Bima dikategorikan sangat baik. Namun pada Inspektorat Kota Bima khususnya pada tindak lanjut hasil pemeriksaan, disiplin, merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat masih lemah, kelemahan-kelemahan tersebut yang menghambat proses audit sektor publik dalam pencegahan *fraud*, pemerintah sebaiknya perlu memperhatikan hal tersebut dan mengambil tindakan yang bijaksana dalam mencari jalan keluarnya, mengingat permasalahan yang terjadi timbul pada inspektorat itu sendiri.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif (tabel 4.10), artinya semakin baik implementasi audit sektor publik pada Inspektorat Kota Bima maka pencegahan *fraud* semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik implementasi audit sektor publik di Inspektorat Kota Bima maka pencegahan *fraud* semakin buruk. Arti dari persamaan dalam bentuk penjelasan secara ekonomis yaitu untuk mengetahui koefisien regresi implementasi audit sektor publik sebesar 14,038 (tabel 4.10) menunjukkan

besarnya perubahan pada pencegahan *fraud* apabila variabel implementasi audit sektor publik berubah sebesar satu satuan. Jadi setiap kenaikan implementasi audit sektor publik sebesar satu satuan akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,190 atau sebaliknya. Sementara nilai konstanta sebesar 14,038 menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X bernilai nol.

Untuk mengetahui persentase implementasi audit sektor publik mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, maka digunakan koefisien determinasi. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 diperoleh koefisien determinasi, yaitu $(0,458) = 0,210 = 21\%$. Besarnya sumbangan atau variabel implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* sebesar 21% dan sisanya sebesar 79% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti (tingkat kesadaran masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor pemerintah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh Implementasi audit sektor publik dalam pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Bima

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sabagai bahan evaluasi antara lain implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud*, hendaknya semakin ditingkatkan pada kesuaian dengan standar profesi, karena pengaruhnya sangat tinggi dimana keprofesionalan auditor pemerintah sangat baik maka laporan yang dihasilkan akan lebih akurat untuk membangun pemerintahan yang bersih. Untuk pencegahan *fraud* itu sendiri lebih ditingkatkan merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat dimana penyeleksian karyawan lebih diperketat mengingat *fraud* yang ada semakin tahun semakin tinggi dan juga setelah

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan standar profesinya maka perlu adanya pelatihan dan mempunyai sertifikat auditor hal ini penting pengaruhnya bagi Pemerintahan Kota Bima. Dan kedisiplin para auditor pemerintah dalam audit pemerintahan mengenai Pencegahan *fraud* lebih ditingkatkan agar pemerintahan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya agar kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Bima ini lebih dirasakan oleh seluruh penjurur masyarakat Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor*. Bandung : Alfabeta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik*, Jakarta: Kencana
- Riduwan. 2007. *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husen. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara